

MEMBANGUN DENGAN TITIK BERAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Oleh:
BEDJO SUKARNO *)

ABSTRACT

In district there are various problem about public service like health, and environment prosperity of society. All that determined by ability of area to defray most its expenditure. Absolute this time needed a economic democracy climate of can give the contribution to economic development of each, every society segmen. Economic democrcy have to be sustained by political struktur. Governmental role can do/conduct various area as bussines, coordinator, stimulator and fasilitator.

Key word : - Focus development economic in perspektive autonomy.
- Government clown in regional.

*) Dosen FISIP UNISRI Surakarta

Pendahuluan

Kecenderungan yang terjadi di berbagai negara akhir-akhir ini adalah perlambatan ekonomi sebagai imbas dari krisis keuangan global yang sebelumnya terpusat di Amerika Serikat. Dengan cepat krisis ini menjalar ke seantero dunia, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang. Beberapa negara di kawasan Asia seperti Singapura, Jepang, Hongkong dan Korea Selatan, juga telah merasakan imbas krisis. Ini dapat dilihat dari kecenderungan melemahnya perekonomian keempat negara adidaya di Asia tersebut. Jadi boleh dikatakan bahwa keempat negara di Asia tadi sudah mengalami gelombang krisis tahap ketiga, sedangkan gelombang krisis

tahap pertama melanda di AS dan dengan cepat memasuki kawasan Eropa sebagai gelombang krisis tahap kedua.

Gelombang krisis tahap keempat kini sudah mengintai Indonesia, karena negara kita memiliki kedekatan dengan keempat negara Asia yang sudah didera oleh krisis terlebih dahulu. Pemerintah sudah mengingatkan bahwa tahun 2009 ini tekanan krisis akan semakin kuat sehingga dibutuhkan persiapan yang matang untuk menghadapinya. Sinyalemen pemerintah masuk akal jika menilik pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang berkisar 6,1 % sementara target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini dikoreksi menjadi 4,5% - 5% saja. Pemerintah menyadari bahwa perlambatan ekonomi global

memberikan dampak langsung ke perekonomian nasional. (Riyan Kiryanto, SM Jan 2009-5)

Titik berat pembangunan yang harus di implementasikan yang akan datang telah menjadi bahan pemikiran oleh para elit politik, birokrat dan tentunya para cendekiawan di Indonesia. Ada suatu gagasan yang muncul pada saat ini yang dianggap baik oleh pemerintah dan cendekiawan maupun dari elit politik patut mendapatkan dukungan dari masyarakat yaitu pembangunan ekonomi daerah.

Sejarah kita telah membuktikan bahwa hampir semua gejolak yang besar yang pernah kita alami selama ini selalu berkisar pada isu politik yang menyangkut mengenai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Oleh karena itu kehendak pemerintah dan para cendekiawan serta elit politik untuk menjadikan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu kehendak yang seharusnya dihargai karena sesuai dengan tuntutan dalam keadaan perekonomian sekarang ini. Tanpa ada suatu kebijaksanaan konkrit untuk menjabarkan dan merealisasinya, pembangunan ekonomi daerah merupakan konsep yang kompleks sifatnya, karena konsep tersebut dalam suatu kebijaksanaan pembangunan yang berarti. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan dan kemauan dari para pengelola-pembangunan di daerah untuk menciptakan lingkungan politik dan ekonomi yang dapat menunjang kelancaran implementasinya.

Otonomi daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang makin baik, pengembangan dalam kehidupan demokrasi yang makin baik pula, serta dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakatnya. Segala potensi sumber daya yang tersediapun diharapkan dapat dikelola secara optimal.

Prakarsa, kreativitas serta partisipasi masyarakat dipacu sebagai upaya percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dan rendahnya kesempatan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitannya dengan persoalan yang melingkupi kebijakan otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah adalah permasalahan mendasar yang masih belum teratasi. Sampai saat ini fenomena melalui otonomi daerah masih terkendala dengan keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Serta masih terjadi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan.

Ketidaksiapan aparat pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah menjadikan banyak daerah masih kesulitan untuk mencari sumber pembiayaan yang otonom. Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa alokasi dana pembangunan daerah dinilai belum tepat sasaran. Di daerah-daerah saat ini banyak proyek-proyek pembangunan tidak tepat sasaran dan

tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini berakibat pada inefisiensi pembiayaan pembangunan.

Kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya bersifat tambal sulam, kasus seperti ini di era otonomi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih terasa karena keterbatasan kemampuan atau ketrampilan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan, serta keterbatasan pendanaan pembiayaan pembangunan di daerah.

Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Perspektif Otonomi

Kebijakan otonomi daerah berakar dari konsep tentang desentralisasi, yakni pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dalam bukunya Hm, Safi'i menurut Kaho (1998) bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem dalam mana bagian dari tugas-tugas negara diserahkan penyelenggaraannya kepada institusi yang mandiri. Institusi ini berkewajiban untuk melaksanakan wewenang sesuai dengan kehendak dan inisiatif programnya sendiri (HM. Safi'I, 2007).

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas, memiliki pendapatan daerah (PAD), memiliki badan perwakilan yang mampu mengontrol eksekutif daerah dan adanya

kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui suatu pemilihan yang bebas.

Ciri yang bisa dikenali dari teori desentralisasi ini bahwa pemerintah local harus diberi otonomi dan kebebasan, dan banyak yang harus dianggap sebagai wilayah terpisah yang tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Karakteristik lainnya pemerintah local setidaknya memiliki batas-batas kewilayahan yang ditetapkan secara hukum. Hal itu supaya pada tataran administrative sebuah pemerintah local mampu melaksanakan fungsi-fungsinya, yang otomatis sinergis dengan pemerintah local lain. Pada saat yang sama, pemerintah local memperoleh status kelembagaan yang jelas sekaligus wewenang kekuasaannya.

Walaupun dengan UU No. 32/2004, kebijakan otonomi daerah belum sepenuhnya mampu mengatasi problem-problem yang muncul di lapangan secara tak terduga. Abdul Wahab (2004) menyatakan, dengan otonomi yang relative luas, hampir menjangkau seluruh kewenangan pemerintahan (kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, serta agama), maka secara teoritis proses pengambilan keputusan dan rentang mata rantai partisipasi menjadi semakin dekat dengan rakyat (HM.Safi'I, 2007).

Dengan kekuasaan seluas itu, kedua institusi tersebut dalam proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi makin responsive terhadap

berbagai tuntutan local, serta lebih mampu memobilisasi sumber-sumber ekonomi local secara lebih efektif ketimbang pemerintah pusat. Konsekwensi politik maupun administrative dari implementasi otonomi daerah yang luas cakupannya tersebut sungguh amat berat.

Berbagai persoalan local di seputar pelayanan publik mulai dari kesehatan hingga lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan kini akan ditentukan oleh apa yang disebut revenue raising capacity atau kemampuan daerah untuk membiayai sebagian besar pengeluarannya (local funding capacity) dari daerah sendiri. Itu dapat diartikan bahwa untuk sebagian besar akan tergantung pada kemampuan elit politik dan elit birokrasi daerah sendiri untuk senantiasa secara kreatif berusaha menemukan strategi dan mekanisme yang tepat guna mengongkosi seluruh belanja rutin dan program-program pembangunan lokalnya.

Organisasi negara merupakan sebuah entitas yang sangat komplek, pemerintah negara mengelola berbagai dimensi kehidupan, misalnya dibidang pelayanan sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik dan integrasi nasional. Negara selain memiliki fungsi distributive atas hal-hal yang disebutkan di atas yang juga memiliki fungsi regulative. Sedangkan factor demokrasi dan sistem desentralisasi adalah akuntabilitas public, para pemegang jabatan public bisa

mempertanggung jawabkan segala tindakan atau yang dijalankannya kepada masyarakat local. Dengan adanya otonomi daerah maka akuntabilitas public akan bisa lebih dikontrol oleh masyarakat setempat.

Program otonomi daerah memang diarahkan pada akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Hal itu dapat dijadikan dasar motivasi bagaimana agar pemerintah daerah dapat merangsang kreativitas masyarakat dan dirinya sendiri untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Otonomi daerah akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah jika konsep desentralisasi di dalamnya dimaknai sebagai pembuka ruang partisipasi dan emansipasi serta berorientasi pada paradigma pemberdayaan yang memang menempatkan masyarakat sebagai basis materialnya.

Pembangunan yang berorientasi pada perekonomian tidak cukup hanya dengan menyediakan kebutuhan hidup pokok bagi rakyat. Karena pada hakekatnya kebutuhan manusia tidak hanya terbatas kebutuhan fisik saja yaitu makan, minum dan pakaian, tetapi ia juga berhak berserikat dan berhak memperoleh peradilan secara adil dan sebagainya.

Pembangunan ekonomi di daerah diharapkan haruslah menjamin tiap warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan dan memiliki factor produksi, dan menjamin agar rakyat secara keseluruhan dapat melaksanakan

hak-hak konstitusional mereka.

Pemerataan dalam pemilikan faktor produksi merupakan syarat bagi tiap manusia untuk dapat menggunakan atau menikmati pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Sebagai seorang buruh petani akan mungkin dapat menyekolahkan anaknya sampai derajat tertinggi umpamanya, apabila ia mempunyai tanah. Para buruh tani ini baru dapat menggunakan atau menikmati pelayanan itu, bila mereka mempunyai tanah untuk memproduksi, oleh karena itu supaya pembangunan ekonomi dapat mempunyai makna bagi mereka ini maka landreform mutlak diperlukan.

Disamping itu, untuk melaksanakan pembangunan yang bertitik berat pada perekonomian perlu aparat yang bersih. Disinilah pentingnya usaha pemberantasan korupsi di kalangan aparat pemerintah harus lebih digiatkan lagi. Pemberantasan korupsi yang berhasil akan meningkatkan solidaritas sosial aparat pemerintah terhadap rakyat, khususnya mereka yang miskin.

Solidaritas sosial di sini tidak hanya terbatas pada aktivitas aparat pemerintah dalam mengunjungi rumah-rumah yatim piatu, tapi yang lebih penting adalah solidaritas sosial dalam arti kejujuran dalam mengelola dana yang disediakan oleh pemerintah bagi si miskin dan rakyat banyak.

Demokrasi Ekonomi

Kepincangan struktur dunia usaha itu telah menciptakan kemencengan dalam distribusi pendapatan,

kesenjangan dan ketidakadilan. Kurang pekanya terhadap permasalahan tersebut kemudian menimbulkan gejala yang menggoncangkan kehidupan nasional secara keseluruhan. Untuk itu merupakan tanggungjawab bersama dalam menghindarkan terjadinya gejala ekonomi dan sosial. Hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan dan mengganggu kesinambungan pembangunan nasional.

Sekarang ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan koreksi, yang mencakup penataan struktur perekonomian dan struktur kelembagaan ekonomi sehingga terwujud demokrasi ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi, baik koperasi, BUMN/BUMD, dan dunia usaha swasta harus terus dipacu secara bersama-sama sehingga mampu berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi.

Peranan usaha swasta juga penting tetapi tidak harus dominan, agar dapat dicegah timbulnya free fight liberalism. Sebaliknya masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral perekonomian berdasarkan pasal 33/UUD 1945. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat. Campur tangan negara harus menjadi arahan dasar perekonomian agar dapat tersusun sistem perekonomian berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan (Didik J Rachbini, 2001-89).

Untuk menggerakkan perkembangan politik lebih cepat lagi sudah sangat terasa ketika pemerintahan

memerlukan partisipasi masyarakat lebih banyak untuk terlibat dalam pembangunan nasional. Pentingnya usaha-usaha melakukan reformasi ini menuntut adanya perluasan demokrasi politik dan ekonomi seiring pendewasaan dan meluasnya tingkat partisipasi kehidupan rakyat. Sekarang ini mutlak diperlukan iklim demokrasi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan. Pembangunan ekonomi harus memberikan kesempatan yang luas bagi setiap segmen kemasyarakatan dan kesempatan untuk tumbuh berkembang. Demokrasi ekonomi itu harus ditopang oleh struktur politik yang terbuka, yang jauh dari kecenderungan monolitik dan memberi tempat bagi adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam masyarakat berdasarkan konstjitusi. Mentolelir adanya kritik aspirasi pembaharuan dan bukannya menganggap semua itu mengganggu stabilitas. Penyelenggaraan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi oleh pendiri bangsa, merupakan bentuk sistem perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter masyarakat. Demokrasi ekonomi merupakan upaya guna menciptakan, memelihara dan meningkatkan kapabilitas dan sistem ekonomi, sekaligus membuat sistem itu senantiasa mampu mendorong untuk memotivasi segala sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan untuk kemakmuran masyarakat. Melalui demokrasi ekonomi akan

terwujud kekuatan ekonomi di masyarakat secara merata dan tidak terkumpul di beberapa tangan anggota masyarakat. Dengan harapan perubahan-perubahan tersebut tidak hanya berlaku pada aparat negara akan tetapi juga partai-partai politik yang ada haruslah mengubah tata kerja dan sikap mental mereka. Partai politik berani untuk benar-benar berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat. Karenanya para pimpinan partai harus juga seperti halnya dengan para aparat negara, memiliki solidaritas sosial yang tinggi dengan rakyat. Kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi seharusnya menjadi pertimbangan utama dari para pimpinan partai dalam mengatur tata kerja mereka dengan pemerintah. Pembangunan perekonomian pelaksanaannya tidak mungkin kita serahkan keseluruhannya kepada aparat pemerintah.

1. Karena aparat pemerintah pada kenyataannya sangat terbatas jumlahnya, disamping keterbatasan biaya.
2. Karena target groups dalam pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang arahnya ditujukan pada masyarakat yang miskin dan yang tertinggal, maka perlu diciptakan mekanisme kerja khusus yang dapat membuat program pembangunan benar-benar mencapai mereka. Betapapun efisiensinya suatu birokrasi aparat pemerintahan, mereka harus bergerak melalui prosedur dan hirarki tertentu. Karenanya aparat birokrasi tidak akan

cukup mempunyai kegesitan dalam pengambilan keputusan atau bertindak dengan cepat guna melayani kebutuhan masyarakat miskin.

Di samping itu karena anggota masyarakat miskin ini biasanya adalah diam dan jumlahnya tersebar, maka untuk dapat mengajak mereka berpartisipasi dalam pembangunan dibutuhkan suatu pendekatan khusus. Di sinilah letak pentingnya peranan organisasi non pemerintah dalam implementasi pembangunan ekonomi di daerah. Peranan organisasi non pemerintah ini adalah membantu masyarakat golongan miskin untuk mengorganisasi diri mereka sehingga kehendak mereka dapat tersalurkan dengan baik.

Namun agar pemerintah dapat menarik organisasi non pemerintah secara aktif dalam proses pembangunan ekonomi, sudah barang tentu beberapa persyaratan perlu dipenuhi, antara lain :

1. Pemerintah serta organisasi politik yang mendukungnya harus mengakui bahwa hak untuk mengklaim keberhasilan pembangunan bukanlah merupakan monopoli aparat birokrasi pemerintah.
2. Pemerintah diharapkan mengubah persepsinya terhadap fungsinya dalam proses pembangunan. Seharusnya melihat bahwa fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator dan bukan hanya sebagai regulator dalam proses pembangunan di daerah ini.

Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi di Daerah

Di negara kapitalis maju maupun negara sedang berkembang, berbagai kebijakan pembangunan yang ditempuh untuk pengembangan sector ekonomi dan bisnis secara makro serta keputusan-keputusan strategik yang dibuat oleh beragam pelaku bisnis tidak mungkin berlangsung dalam situasi yang vakum. Artinya, keputusan itu tidak mungkin terbebas sama sekali dari nilai-nilai, pandangan hidup atau ideologi tertentu yang dianut oleh penguasa dan berbagai factor sosial politik yang melingkupi proses pembuatan keputusan itu, misalnya struktur pendapatan, komposisi suku bangsa, sistem kepartaian dan lain sebagainya (Oma Sukmana, 2005-207).

Pemerintah atau birokrasi adalah sebuah entitas kelembagaan yang paling dominant dan sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Peran pemerintah sangat vital di dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa, eksistensi pemerintah sangat diperlukan oleh setiap masyarakat karena tidak semua interaksi ekonomi dan sosial dapat dikelola dengan cara altruisme, anarki dan mekanisme pasar. Upaya menjaga efisiensi pemerintah juga merupakan hal yang penting, ada jenjang dan pembedaan efisiensi pemerintah di dalam negara karena kemnatangan satu bangsa berbeda dengan lainnya.

Max Weber menyebutkan, relative dan realistis bahwa birokrasi merupakan suatu organisasi besar yang secara tehnik lebih unggul dibandingkan dengan organisasi lainnya. Keunggulan ini terjadi karena untuk tujuan pengambilan keputusan strategis, alasan rasional, serta

kepentingan yang ada di dalamnya.

Selanjutnya Max Weber (Didik J Rachbini, 2006-132) melihat ada enam ciri dari birokrasi yang rasional, yakni :

1. Tugas-tugas pemerintahan dibagi menjadi dua wilayah yaitu tugas-tugas tetap dan tugas-tugas resmi (fixed and official jurisdictional areas).
2. Ada piramida hierarkis dari otoritas di dalam organisasi.
3. Manajemen dari kegiatan resmi biokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis.
4. Aparat birokrasi yang ada dilatih secara khusus.
5. Aparat birokrasi bekerja penuh untuk (tugas-tugasnya).
6. Lembaga birokrasi digerakkan dengan aturan-aturan yang tetap.

Meskipun demikian tugas-tugas birokrasi tidak hanya menyangkut urusan sosial dan politik, tetapi juga menyangkut masalah-masalah ekonomi. Dalam lingkup kebijakan negara yang dominant kearah ekonomi pada saat ini, maka muncul prespektif baru tentang peranan pemerintah dalam bidang ekonomi. Tugas-tugas dalam bidang ekonomi harus mempertimbangkan perspektif teori-teori ekonomi yang mengarah pada pasar, efisiensi, pencapaian keuntungan yang optimal, dan kesejahteraan anggota masyarakat secara umum.

Dalam bukunya HM. Safi'i, menurut Kuncoro (2004), teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh

karena itu, suatu pendekatan alternative untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah (HM.Safi' I, 2007).

Dalam pembangunan ekonomi daerah peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator.

1. Wirausaha
Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi.

Misalnya, pembangunan wisata di Kabupaten Cilacap sejauh ini masih berorientasi pada sektor kelautan, padahal kabupaten ini juga mempunyai potensi wisata lain yang cukup baik untuk dikembangkan secara professional terutama di wilayah Kecamatan Majenang.

Untuk mengembangkan obyek wisata di Majenang peran pemerintah daerah sangatlah penting. Peran pemerintah Kabupaten Cilacap tidak sebatas mendukung pengembangan dan

pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjembatani dan menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan Perhutani. Sebab obyek wisata tersebut berada di dalam kawasan hutan milik Perhutani (Heru Susediyono, SM-Januari 2009).

Organisasi kemasyarakatan memainkan peran penting dalam memainkan peran kewirausahaan sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, atau untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk dapat menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya. Peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang tingkat ketersediaan pekerjaan, atau angkatan kerja, pengangguran dan jumlah perusahaan.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan

pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Adanya tujuan yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program-program yang lain.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha dalam melakukan aktivitasnya di daerah dengan merasa aman.

Misal, dengan menyediakan bangunan – bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan potongan biaya sewa pada beberapa tahun pertama.

Penutup

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan pemerintahan di daerah untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan daerah yang diterima dari pemerintah pusat

tersebut disebut sebagai otonomi.

Negara kini harus rela berbagi peran, berbagi kekuasaan, dan bekerja sama saling menguntungkan, adanya keterbukaan dan menghindari terjadinya korupsi dengan kekuatan-kekuatan sosial otonom dalam masyarakat.

Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah yang bersangkutan, sikap mental elit politik dan birokrat, kebutuhan dan kemampuan daerah dalam melaksanakannya. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan factor lainnya seperti persoalan mengenai sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan yang lain.

Dalam kenyataan memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah meningkat tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kota maupun di pedesaan. Dalam menekankan pembangunan sebagai proses bertahap dan terarah merupakan pandangan yang lebih tepat digunakan di daerah-daerah di Indonesia dengan kasus-kasus tertentu.

Pemerintah harus memberikan kejelasan bahwa kesejahteraan ekonomi yang akan dicapai sesuai dengan kehendak masyarakat daerah, karena dari masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui sector ekonomi mana yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, dipertahankan, sesuai dengan sosial budaya daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Didik J Rachbini, 2001, Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi, Jakarta, Grasindo.

J.Rachbini, 2006, Ekonomi Politik. Bogor, Ghalia Indonesia.

HM. Safi'I, 2007, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Derah dalam Perspektif Teoritik, Malang, Averroes Press,

Heru Susediyono, Opini, 5 januari 23009, Suara merdeka, Semarang.

Oman Sukmana, 2005, Sosiologi dan Politik Ekonomi, Malang, UMM Press,

Riyan Kiryanto, 10 Januari 2009, Opini, Suara Merdeka, Semarang